

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan menampilkan simpulan dan rekomendasi mengenai hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Simpulan yang dibuat memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat di rumusan masalah di Bab I. Selain itu, simpulan dalam bab ini juga merupakan hasil dari pemaknaan dan penafsiran penulis terhadap hasil analisis temuan terkait “Peranan Kaum Belanda Depok dalam menjalankan pemerintahan *Gemeente Bestuur* (1913-1952)”. Selanjutnya, dalam rekomendasi penelitian akan disajikan beberapa saran mengenai temuan penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Simpulan

Pertama, sejarah Depok dimulai saat Cornelis Chastelein (seorang Huguenot/Protestan) membeli tanah di Depok pada tahun 1696 dari seorang Residen Cirebon bernama Lucas van der Meur seharga 300 *rijksdaalder* (Koin Belanda) dengan luas tanah 1.244 ha yang meliputi Depok, Mampang, Karang Anyar (sekarang Cinere) menandakan status tanah Depok resmi menjadi tanah partikelir dengan hak *eigendom*. Pada awal abad ke-18, Cornelis mendatangkan 150 budak dari Bali, Sulawesi (Makassar), Timor (Nusa Tenggara), dan Benggali India. Budak tersebut diperlukan untuk menggarap tanah Depok menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Tercipta hubungan *parton-client* antara Cornelis dengan para budaknya lalu tercetus gagasan Cornelis untuk mendirikan masyarakat Kristen Depok dari para budaknya yang menyatukan diri sebagai kaum Belanda Depok. Gagasan tersebut membuat Cornelis memerdekakan dan mewariskan tanah partikelir Depok kepada para budaknya dengan syarat melakukan sakremen pembatisan. Hal ini tercantum dalam surat wasiat pada tanggal 13 Maret 1714. Cornelis wafat pada 28 Juni 1714 di usia 57 tahun. Dalam surat wasiatnya, Cornelis mengangkat budak kepercayaan, Jarong van Bali sebagai pemimpin tanah partikelir Depok. Ditinjau dari historitasnya, surat wasiat Cornelis menjadi cikal bakal dari lahirnya *Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok*.

Kedua, pembentukan marga kaum Belanda Depok terdiri dari 12 marga dengan nama seperti Jonathans, Laurens, Bacas, Loen, Isakh, Samuel, Soedira, Leander, Joseph, Tholense, Jacob dan Zadokh. Seiring berjalannya waktu, hanya tersisa 11 marga karena marga Zadokh mengalami kepunahan. Di tahun 1886, terbentuk *Reglement van Het Land Depok*, lalu disempurnakan pada tahun 1891 dan akhirnya pada tanggal 14 Januari 1913 *reglement* tersebut menghasilkan tatanan *Het Gemeente Bestuur van Particuliere Land Depok* yang ditandatangani oleh Gerrit Jonathans dan M. F. Jonathans selaku presiden pertama dan sekretaris *Gemeente Bestuur* Depok. Kaum Belanda Depok berperan penting dalam kepengurusan badan *Gemeente Bestuur* yang ditetapkan setiap dua hingga tiga tahun sekali. Struktur badan kepengurusan terdiri dari seorang presiden, seorang sekretaris, dua orang *kassier* (bendahara), dua orang *gecommitteerden* (komisaris) dan seorang tenaga pembukuan yang dilengkapi dengan dua orang *kumitir* (mantri lumbung) dan *pecalang* (polisi desa). *Reglement van Het Land Depok* menjadi pedoman bagi kelima Presiden Depok dalam menjalankan pemerintahan *Gemeente Bestuur* Depok. Kelima Presiden Depok bernama Gerrit Jonathans, Frederick Samuel Laurens, G. Loen, Johannes C. Jonathans, dan Johannes Mathijs Jonathans.

Ketiga, pada saat kolonialisme Jepang (1942-1945), *Gemeente Bestuur* Depok tetap menjalankan tugas di bawah wewenang Presiden Depok. Masyarakat Depok dapat memenuhi tuntutan Jepang, seperti menyerahkan seluruh hasil panen dan memenuhi permintaan pekerja *romusha*. Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa Gedoran Depok. Nama “Gedoran” berasal dari pintu-pintu rumah kaum Belanda Depok digedor-gedor secara keras. Kaum Belanda Depok menjadi korban karena dianggap tidak mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dan lebih memihak kepada Belanda. Pada 8 April 1949, pemerintah RI mengeluarkan Keputusan Pemerintah Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir di seluruh daerah Indonesia. Peraturan tersebut menjadi tanda dari berakhirnya status tanah partikelir Depok. Tepatnya 4 Agustus 1952, tanah Depok resmi bergabung dalam pemerintahan RI dan statusnya menjadi tanah Negara, di bawah Kawedanaan Parung, Kabupaten Buitenzorg. Dibentuk pula sebuah lembaga dengan nama Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) yang bertujuan memperingati dan menghormati jasa-jasa Cornelis Chastelein dan memberikan pelayanan sosial serta

menyelenggarakan pendidikan bagi kaum Belanda Depok. Johannes Mathijs selaku Presiden Depok terakhir dipilih menjadi ketua dalam kepengurusan YLCC.

5.2 Rekomendasi

1. Program Studi Pendidikan Sejarah

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam materi perkuliahan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Kajian dalam skripsi ini dapat memperkaya referensi pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial, Studi Masyarakat Indonesia, Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Sampai Demokrasi Terpimpin, Sejarah Sosial dan Sejarah Lokal. Di sisi lain, pembahasan mengenai, “Peranan Kaum Belanda Depok dalam menjalankan pemerintahan *Gemeente Bestuur* (1913-1952)” dapat ditujukan kepada para akademisi umum yang memiliki minat pada bidang sejarah, khususnya sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena terdapat pembahasan terkait sejarah Indonesia masa revolusi dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi dan revolusi fisik.

2. Pembelajaran Sejarah di Sekolah

Hasil kajian dalam skripsi ini dapat berguna untuk pembelajaran di sekolah dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk peserta didik di Tingkat SMA/MA/Sederajat. Khususnya bagi mata pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI, terkait materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Secara praktik, skripsi ini sejalan dengan materi Kompetensi Dasar (KD) 3.3 terkait “Menganalisis dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini”.

3. Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan fakta-fakta sejarah yang kredibel, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya yang ditujukan kepada pada sejarawan, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah yang berminat untuk melakukan penelitian dengan mengambil latar tempat dan

waktu yang sama, namun berbeda dalam sudut pandang, dapat menggunakan skripsi ini sebagai sebuah rujukan. Karena penulis telah melampirkan beberapa dokumen dan surat kabar sebagai sumber primer yang diperoleh dari lembaga resmi, sehingga segala bentuk fakta sejarah yang tercantum dalam skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kreadibilitasnya.

Selain disajikan beberapa rekomendasi penulis terkait penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap penelitian mengenai "Peranan Kaum Belanda Depok dalam *Gemeente Bestuur* (1913-1952)" ini dapat memberikan sumbangsih bagi kajian sejarah di Indonesia. Pada tataran praktik, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peserta didik di tingkat SMA/MA/Sederajat.